

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Board Independence* sebagai Variabel Moderasi

Iit Gusti Sri Murni^{1*}, Vanica Serly²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: iitgustisrimurni@gmail.com

Tanggal Masuk:
13 Mei 2024
Tanggal Revisi:
08 Juli 2024
Tanggal Diterima:
24 Juli 2024

Keywords: *Institutional Ownership; Government Ownership; Foreign Ownership; Corporate Social Responsibility Disclosure; Board Independence.*

How to cite (APA 6th style)

Murni, I.G.S., & Serly, V. (2024). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan *Board Independence* sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 1127-1143.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.165>

Abstract

This research aims to determine how ownership structure influences Corporate Social Responsibility disclosure with Board Independence as a moderating variable. CSR disclosure is the dependent variable, while institutional, government and foreign ownership are the independent variables. The moderating variable is board independence. CSR disclosure is measured by dividing the disclosure weight by the number of disclosure items. Institutional ownership is measured by dividing institutional shares by total shares. Government ownership is measured by dividing government shares by total shares. Foreign ownership is measured by dividing foreign shares by total shares. Board Independence is measured by dividing the number of independent commissioners by the total board of commissioners. The data consists of annual and sustainability reports of mining companies in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange for 2018-2022, with 28 companies as samples. Purposive sampling and moderated linear regression were used for data analysis. The research results show a negative impact of institutional and government ownership on CSR disclosure, while foreign ownership has a positive impact. Board Independence increases the relationship between institutional ownership and CSR disclosure, whereas government and foreign ownership do not.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar, di luar kewajiban hukum dan ekonomi perusahaan (Zaid et al., 2020). Pengungkapan CSR merupakan konsep manajemen yang berarti perusahaan tidak lagi bertanggung jawab hanya berdasarkan nilai-nilai perusahaan yang hanya tercermin dalam keuntungan finansial atau keuntungan (Ramadhanty & Budiasih, 2020). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

harus melengkapi keinginan pemilik saham dan stakeholder dalam operasional bisnis. Oleh karena itu, selain kondisi keuangan, tanggung jawab perusahaan juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan (Dyck et al., 2019). CSR menunjukkan transparansi dan tanggung jawab lingkungan perusahaan (Rizky & Yuyetta, 2015).

Pada tahun 2017-2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengidentifikasi dan mencatat banyak perusahaan migas dan tambang yang terkena sanksi karena pengotoran lingkungan. Beberapa contoh perusahaan tersebut adalah PT Chevron Pasific Indonesia dan PT Pertamina EP di wilayah operasi kabupaten Kampar, dan lain sebagainya (katadata.co.id, 2021). Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan bahwa banyaknya perusahaan di Indonesia yang tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang CSR.

Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang menggabungkan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, tanggungjawab, otonomi, ketidakberpihakan dan rasionalitas (Masitoh & Hidayah, 2018). Tingkat pengungkapan CSR bergantung pada tata kelola perusahaan (Panjaitan, 2019). Pada dasarnya, GCG terkait erat dengan tanggung jawab sosial (CSR) (Agustia, 2013). Salah satu prinsip GCG adalah tanggung jawab, yang dapat dicapai melalui penerapan CSR sebagai tugas perusahaan terhadap ekosistem sekitarnya (Becker et al., 2015).

Struktur kepemilikan merupakan tingkat pengawasan yang dilakukan dalam sebuah bisnis untuk menjalankan aktivitas bisnis yang memperhatikan perspektif sosial dan lingkungan (Adhima & Indriastuti, 2022). Struktur kepemilikan merupakan bagian dari GCG yang berdampak pada tanggung jawab sosial perusahaan serta berfokus pada struktur pemilik modal saham dan independensi dewan. Salah satu indikator struktur kepemilikan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah saham yang dimiliki oleh entitas atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dll yang mana berguna untuk mengawasi manajemen (Rivandi, 2021). Kemampuan mereka untuk mengawasi manajemen ditunjukkan oleh kepemilikan yang signifikan oleh investor institusi (lebih dari 5%) (Latifah & Widiatmoko, 2022). Tingkat kepemilikan yang signifikan di dalam institusi akan memfasilitasi peningkatan pengawasan (Putri & Achmad, 2020).

Kepemilikan pemerintah mengacu pada jumlah saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak berwenang. Menurut Lopatta et al. (2017) mengartikulasikan bahwa pemerintah, sebagai pemegang saham pengendali perusahaan, selalu mempunyai insentif untuk melakukan upaya sosial secara sistematis dan stabilitas lingkungan. Li & Zhang (2010) menunjukkan bahwa penting untuk mempertimbangkan jenis kepemilikan dalam menganalisis CSR di suatu negara berkembang. Pemerintah memiliki saham dalam perusahaan, yang memungkinkan mereka melaporkan informasi tambahan untuk memenuhi harapan publik dalam pengungkapan CSR (Amran & Devi, 2015). Untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan perusahaan, pemerintah biasanya memberikan pengungkapan CSR yang jelas sesuai dengan peraturan (Zaid et al., 2020).

Kepemilikan asing mengacu pada jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh entitas asing (Edison, 2017). Pemangku kepentingan luar negeri memiliki kapasitas untuk mengawasi efisiensi administrator atau manajer (Randøy & Goel, 2013). Akibatnya, perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung mengungkapkan lebih banyak rincian CSR dalam upaya untuk mengatasi konflik kepentingan manajemen puncak dan pihak luar negeri (Wang et al., 2013). Pihak dalam negeri tidak sama dengan pihak luar negeri. Problem ketenagakerjaan, pemanasan global, dan pencemaran lingkungan adalah prioritas utama bagi negara-negara asing (Jain & Jamali, 2016). Selain itu, karena mereka tidak bisa terlibat langsung dalam operasi sehari-hari perusahaan, mereka lebih fokus pada peningkatan potensi GCG atau perusahaan.

Board Independence adalah anggota direksi yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan (Adhima & Indriastuti, 2022). Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Consuelo & Martínez (2018), *board independence* memiliki pengaruh penting pada pengungkapan CSR, karena mereka memiliki otoritas yang lebih besar atas kebijakan perusahaan termasuk yang berkaitan dengan CSR, yang memungkinkan mereka untuk menjamin bahwa perusahaan mematuhi standar etika dan tanggung jawab sosial yang ditetapkan (Gago & García, 2018). Akibatnya, dewan independen memantau pengungkapan CSR dengan cermat (Zaid et al., 2020).

Studi penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan *board independence* sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Perusahaan pertambangan dipilih karena kontribusinya yang signifikan terhadap lingkungan setempat melalui program dan kegiatan CSR. Studi penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman, studi literatur untuk kemajuan pengetahuan ilmiah, memberikan masukan terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan bagi perusahaan, dan memberikan acuan atau landasan untuk studi penelitian selanjutnya. Studi yang dilakukan pada 2018-2022 berbeda dari studi sebelumnya dalam hal waktu, dengan yang pertama terjadi selama 2013-2018. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Perusahaan pertambangan dipilih karena kontribusinya yang signifikan terhadap lingkungan setempat melalui program dan kegiatan CSR, sedangkan studi penelitian sebelumnya termasuk perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Palestina.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi (*agency theory*) adalah teori yang menggali dinamika antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Prinsipal mengambil peran pemilik bisnis, sedangkan agen (manajer) dipercayakan dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi operasi bisnis. Teori agensi ini meneliti tantangan yang berasal dari hubungan agensi. Jensen dan Meckling (1976) mencirikan teori agensi sebagai kerangka kerja yang berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri atas kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Teori ini menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan sangat memengaruhi konflik keagenan. Dalam kasus di mana perusahaan memiliki kepemilikan besar, masalah keagenan muncul antara pemilik saham dan manajemen. Namun, organisasi dengan sumber daya modal yang lebih besar memiliki kemampuan untuk mengatasi perselisihan agensi dengan lebih efektif karena mereka telah meningkatkan peluang untuk melibatkan dan memantau manajer melalui dewan pengawas otonom.

Teori keagenan menyatakan bahwa struktur kepemilikan berupa kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing memiliki insentif tambahan untuk memantau pengungkapan kebijakan, karena mereka adalah pemegang saham yang canggih, yang memiliki banyak hal pengalaman dan sumber daya yang memungkinkan mereka melakukan pemantauan secara efektif keputusan strategis perusahaan sehingga memiliki motivasi lebih untuk mengurangi masalah keagenan perusahaan dan pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berbeda dengan menyelesaikannya permasalahan sosial masyarakat melalui pengeluaran untuk kegiatan terkait CSR.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah keterlibatan perusahaan dalam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar, di luar kewajiban hukum dan ekonomi perusahaan (Zaid et al., 2020). CSR merupakan sebuah konsep manajemen yang berarti perusahaan tidak lagi bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai perusahaan yang hanya tercermin dalam bentuk finansial atau keuntungan (Retnaningsih, 2015). Pemeriksaan mengidentifikasi masalah dalam pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI yang direvisi tahun 2021. GRI menawarkan informasi komprehensif baik kuantitatif maupun kualitatif. Pengungkapan CSR berdasarkan standar GRI menunjukkan kontribusi positif dan negatif suatu organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan perusahaan. Dengan pengungkapan sesuai standar ini, perusahaan menjelaskan topik penting organisasi, dampak terkait, dan cara mengelola dampak tersebut.

***Good Corporate Governance* (GCG)**

Good Corporate Governance (GCG) melibatkan penerapan prinsip - prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Optimalisasi perusahaan, dewan direksi, struktur kepemilikan, dan pemegang saham secara signifikan dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan (Suryanto & Refianto, 2019). Implementasi GCG yang efektif bergantung pada memiliki informasi yang akurat tentang struktur kepemilikan.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan berkaitan dengan distribusi saham di antara investor dan orang dalam, mewakili perbandingan jumlah yang dipegang oleh masing-masing pihak (Saptowinarko Prasetyo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sebagai pemilik bisnis, mereka harus mengelola dan menjaga perusahaan (Annisa & Nazar, 2015). Sebagaimana dinyatakan oleh Yuniati, M., Raharjo, K., & Oemar (2016), struktur kepemilikan saham dapat digambarkan sebagai persentase kepemilikan institusional, asing, dan pemerintah. Ini adalah suatu mekanisme yang dimaksudkan untuk mengurangi ketidaksepakatan antara manajemen dan pemegang saham.

Efek Moderasi dari *Board Independence*

Board Independence berkaitan dengan individu yang bertugas di dewan direksi yang tidak memiliki afiliasi dengan organisasi atau perusahaan tertentu (Adhima & Indriastuti, 2022). Dampak investor profesional (pemerintah, institusional, atau asing) akan lebih signifikan dalam kasus-kasus di mana dewan independen memegang mayoritas. Perusahaan yang tidak memiliki dewan independen akan gagal mencapai standar tata kelola yang diinginkan dan tidak akan menuai keuntungan yang terkait dengan memiliki dewan independen. Akibatnya, pengaruh berbagai kategori manajer profesional terhadap pengungkapan CSR akan dibatasi (Khairunnisa, 2021).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah saham yang dikelola oleh entitas atau perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dll., yang memainkan peran penting dalam mengawasi manajemen (Rivandi, 2021). Kelembagaan ini memiliki kapasitas untuk meningkatkan efisiensi sistem pelaporan perusahaan dengan mengurangi oportunistik manajemen (Rivandi, 2021). Ketika sistem pelaporan perusahaan berfungsi secara efektif, ada peningkatan fokus pada pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Elgergeni dkk. (2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan persentase kepemilikan institusional yang mereka miliki lebih

cenderung terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan CSR. Sebaliknya, Habbash (2016) memberikan hasil yang kontradiktif dengan argumen bahwa kehadiran pemilik institusi mempunyai dampak terhadap proses pengendalian. Meskipun penelitian sebelumnya mengungkapkan temuan yang agak beragam, mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis pertama tentang kepemilikan institusional sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan pemerintah mengacu pada proporsi saham perusahaan yang dipegang oleh pemerintah (Hunday & Tarigan, 2017). Alasan penelitian ini memilih kepemilikan pemerintah yaitu pemerintah memiliki aturan dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah dapat bertindak sebagai alat yang efektif untuk melacak dan mengawasi kinerja manajemen. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Pada titik ini, fokus publik akan diarahkan ke perusahaan milik negara karena keunggulan masalah visibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang berasal dari berbagai pihak berkepentingan, perusahaan milik pemerintah terkemuka untuk berpotensi mengungkapkan informasi tambahan (Khan et al., 2013). Sebuah studi oleh Zaid dkk (2020) menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah berperan dalam membentuk pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Ini menyiratkan dampak yang menguntungkan dari kepemilikan pemerintah pada pengungkapan CSR.

Menurut teori agensi, perusahaan milik negara cenderung menyesuaikan diri dengan pengaruh pemerintah dan didorong untuk mengatasi masalah agensi perusahaan, serta memenuhi kebutuhan pemilik saham, masyarakat, dan stakeholder lainnya dengan mengatasi masalah sosial melalui investasi dalam kegiatan CSR (Said et al., 2009) Mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis kedua tentang kepemilikan pemerintah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan asing mengacu pada persentase saham di perusahaan yang dipegang oleh entitas asing (Edison, 2017). Kehadiran modal asing mengharuskan organisasi untuk memberikan informasi yang lebih luas. Kekhawatiran tetap ada di antara perusahaan asing mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mereka (Khairina Sissandhy, 2014). Adipati Singal (2019) menyoroti meningkatnya minat dalam memeriksa dampak substansial pemodal asing terhadap pengungkapan CSR. Peningkatan kepemilikan asing, menurut pendapat Oh et al. (2011) memberikan tekanan pada manajer untuk terlibat dalam inisiatif sosial.

Studi penelitian sebelumnya (Elgergeni et al., 2018; Haniffa & Cooke, 2013; Khan et al., 2013; Muttakin et al., 2015) telah menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh investor asing dalam meningkatkan pengungkapan Tanggung Jawab Soal Perusahaan (CSR). Studi oleh Edison (2017) dan Kusumawati (2018) telah menunjukkan dampak kepemilikan asing terhadap CSR. Sebaliknya, Branco (2013) bersama dengan Amran & Devi (2015) berpendapat bahwa kepemilikan asing tidak berkontribusi secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. Terlepas dari hasil empiris yang kontradiktif yang ada dalam literatur saat ini, sesuai dengan teori agensi, mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis ketiga tentang kepemilikan asing sebagai berikut:

H3: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan Moderasi Board Independence

Board Independence atau dewan komisaris independen dewan beroperasi sebagai entitas eksternal yang mengawasi kegiatan manajemen pelanggan dan memantau kecenderungan oportunistik manajemen. Cara di mana kemampuan dan pola pikir ini dilaksanakan dapat secara signifikan berpengaruh pada pengungkapan CSR dan struktur kepemilikan secara keseluruhan. Teori agensi menyatakan bahwa kehadiran *board independence* memainkan peran penting dalam memperkuat kepemilikan institusional dan praktik CSR dengan mengurangi konflik dan memastikan perhatian diberikan pada pengungkapan perusahaan dan ringkasan rapat. Pernyataan ini sejalan dengan temuan Zaid dkk (2020) yang mempertahankan bahwa *board independence* berfungsi untuk memperkuat hubungan antara tingkat kepemilikan institusional dan transparansi pengungkapan CSR. Mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis ketiga tentang kepemilikan asing sebagai berikut:

H4: *Board independence dapat memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR*

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan Moderasi Board Independence

Dalam bidang kepemilikan institusional, pengungkapan CSR tunduk terhadap pengaruh *board independence*. Kehadiran dewan semacam itu dapat berhubungan dengan kepemilikan pemerintah. Koneksi ini berakar pada Teori Agensi. Penelitian oleh Zaid dkk (2020) menyoroti peran *board independence* dalam menghindari masalah dan memastikan pertimbangan menyeluruh atas pengungkapan perusahaan selama pertemuan. Selain itu, dewan yang terdiri dari komisaris independen dapat meningkatkan keselarasan antara tugas pemerintah dan pengungkapan CSR. Mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis kelima tentang kepemilikan asing sebagai berikut:

H5: *Board independence dapat memperkuat pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR*

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan Moderasi Board Independence

Meneliti korelasi kepemilikan institusional, pemerintah, pengungkapan CSR, dan *board independence* mengungkapkan temuan yang mendalam. Dampak *board independence* setara dengan kepemilikan asing di ranah struktur kepemilikan. Berdasarkan teori keagenan, kehadiran anggota dewan independen memainkan peran penting dalam mengurangi konflik lembaga, terutama yang timbul antara tim manajemen dan pemangku kepentingan. Penelitian terbaru oleh Zaid dkk (2020) menunjukkan keterlibatan *board independen* dapat meningkatkan kaitan antara pengungkapan CSR dan investor asing. Organisasi dengan jumlah komisaris independen yang lebih tinggi cenderung meningkatkan pengawasan kegiatan manajerial. Mengikuti teori keagenan peneliti menguraikan hipotesis keenam tentang kepemilikan asing sebagai berikut:

H6: *Board independence dapat memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk metodologi penelitian kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2022. Pendekatan pengambilan sampel yang diadopsi

dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2018-2022.	56
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak <i>listing</i> di BEI dari tahun 2018-2022.	(3)
3.	Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i> secara lengkap dari tahun 2018-2022.	(15)
4.	Perusahaan pertambangan yang tidak mengungkapkan CSR pada <i>annual report</i> dan <i>sustainability report</i> secara lengkap pada tahun 2018-2022.	(10)
Jumlah sampel		28
Jumlah sampel x tahun penelitian (2018-2022)		140

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penyelidikan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* dan *sustainability report* perusahaan pertambangan yang diperdagangkan secara publik di BEI periode 2018-2022. Laporan ini dapat diperoleh baik melalui platform online www.idx.co.id atau langsung dari situs web perusahaan masing-masing.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencakup penyebaran rincian mengenai keseluruhan usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks akuntabilitas perusahaan untuk dampak yang berasal dari operasi komersialnya. Pengungkapan semacam itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa perusahaan cenderung tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga untuk mengakui aspek lingkungan (Edison, 2017). Instrumen untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diartikulasikan dengan cara berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{\sum n_j}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berkaitan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh entitas seperti perusahaan asuransi, lembaga keuangan, dan perusahaan investasi. Kepemilikan institusional mencakup peluang, kemampuan, dan pengetahuan yang sesuai yang diperlukan untuk pemeriksaan hasil dan kegiatan operasional. Keterlibatan pemangku kepentingan institusi yang tinggi menciptakan sistem pengawasan yang lebih optimal dan mengurangi sikap oportunistik pengelola (Rivandi, 2021). Pengukuran kepemilikan institusional dirumuskan berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah mengacu pada jumlah saham dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara. Akibatnya, perusahaan di bawah kendali pemerintah berkewajiban untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mereka sebagaimana

dinyatakan oleh Zaid dkk (2020). Pengukuran kepemilikan pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing berkaitan dengan kepemilikan penuh atas saham perusahaan oleh pemegang saham dari luar (asing), termasuk individu, perusahaan asing, atau badan pemerintah asing. Pengukuran kepemilikan asing dirumuskan berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

Board Independence

Board Independence adalah pihak luar perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggan dan mengontrol sikap oportunistik manajemen. *Board Independence* merupakan jembatan antara principal dan manajer (Sofwan, 2019). Pengukuran *Board Independence* dirumuskan berikut:

$$BI = \frac{\text{Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan CSR	140	0.165	0.647	0.40311	0.115211
KepemilikanInstitusional	140	0	0.998	0.78300	0.244453
Kepemilikan Pemerintah	140	0	0.900	0.04472	0.177678
Kepemilikan Asing	140	0	0.981	0.28179	0.352233
Board Independence	140	0.250	0.833	0.42006	0.103888

Penelitian ini menggunakan 140 data pengamatan dari 2018 hingga 2022. Tabel 4 menampilkan statistik deskriptif untuk pengungkapan CSR oleh perusahaan pertambangan di BEI, dengan rata-rata 0,40311, maksimum 0,647, minimal 0,165, dan standar deviasi 0,15211. Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia dari 2018-2022 memiliki kepemilikan institusional rata-rata 0,78300, dengan kepemilikan maksimum 0,998 dan minimum 0.000. Standar deviasi kepemilikan institusional adalah 0,244453. Kepemilikan pemerintah rata-rata 0,04472, dengan maksimum 0,9 dan minimum 0.000. Standar deviasi kepemilikan pemerintah adalah 0.177678. Kepemilikan asing perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia rata-rata 0,28179 dari 2018 hingga 2022, dengan maksimum 0,981 dan minimal 0,00. Standar deviasi kepemilikan asing selama periode ini adalah 0,352. *Board Independence* perusahaan pertambangan ini rata-rata 0,42006, dengan maksimum 0,833 dan minimal 0,25 dan standar deviasi 0,10388.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000
	Std. Deviation	0.10222306
Most Extreme Differences	Absolute	0.06
	Positive	0.06
	Negative	-0.052
Test Statistic		0.06
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Menurut temuan pada Tabel 5, nilai uji statistik adalah 0,06 dan nilai signifikansi ialah 0,200. Akibatnya, data mengikuti distribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,200 atau hasil tes melebihi 0,05 ($0,200 > 0,05$).

Uji Multikolinearitas

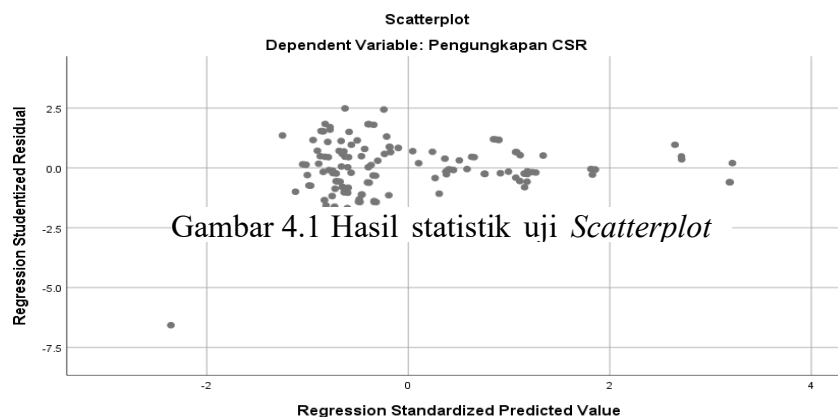
Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KepemilikanInstitusional	0.948	1.054
	KepemilikanPemerintah	0.966	1.036
	KepemilikanAsing	0.978	1.023
	Board Independence	0.94	1.063

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Tabel 6 menunjukkan semua variabel memiliki TOL > 0.1 dan VIF < 10. Oleh karena itu, disimpulkan tidak adanya multikolinearitas di antara variabel independen dalam lingkup studi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Hasil statistik uji *Scatterplot*

Uji statistik *Scatterplot* pada gambar menggambarkan hasil titik data yang diposisikan di atas, di bawah, atau sekitar 0, tanpa pengelompokan tepat di atas atau di bawah. Hal ini berarti menunjukkan tidak ada gejala heteroskedastisitas karena tidak adanya pola yang terlihat dalam dispersi data penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0.00802
Cases < Test Value	70
Cases >= Test Value	70
Total Cases	140
Number of Runs	61
Z	-1.696
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.09

a. Median

Hasil uji autokorelasi dalam tabel diatas mengungkapkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,090 di atas 0,05, menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi dalam data karena nilai signifikansi melebihi 0,05.

Uji Regresi Moderasi

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Moderasi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.881	0.11		8.01	0.000
	Kepemilikan Institusional	-0.681	0.1	-20.95	-6.84	0.000
	Kepemilikan Pemerintah	0.216	0.462	0.333	0.467	0.641
	Kepemilikan Asing	0.266	0.095	0.813	2.806	0.006
	Board Independence	-1.515	0.295	-1.366	-5.128	0.000
	Kepemilikan Institusional*Board Independence	2.04	0.299	20.896	6.83	0.000
	Kepemilikan Pemerintah* Board Independence	0.186	1.244	0.107	0.149	0.881
	Kepemilikan Asing* Board Independence	-0.475	0.221	-0.708	-2.147	0.034

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR

Menurut data dalam Tabel 8, persamaan regresi moderasi dapat ditentukan sebagai berikut:

$$Y = 0,881 + -0,681 \text{ KI} + 0,216 \text{ KP} + 0,266 \text{ KA} + -1,515 \text{ BI} + 2,04 \text{ KI.BI} + 0,186 \text{ KP.BI} + -0,475 \text{ KA.BI}$$

Persamaan regresi moderasi menjelaskan bahwa nilai konsisten 0,881 berarti bahwa dengan tidak adanya kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *board independence*, dan interaksi variabel independen dalam pemeriksaan ini dengan *board independence* (moderasi), maka pengungkapan CSR adalah 0,881. Koefisien regresi KI sebesar -0,681 menunjukkan bahwa jika kepemilikan institusional meningkat satu unit, itu mengurangi pengungkapan CSR sebesar 0,681 unit dengan asumsi kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *board independence*, dan interaksi variabel independen dalam pemeriksaan ini dengan *board independence* tetap (moderasi). Koefisien regresi KP sebesar 0,216 menandakan bahwa jika kepemilikan pemerintah naik satu unit maka akan memperkuat pengungkapan CSR sebesar 0,216 unit dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan asing, *board independence*, dan interaksi variabel independen dalam pemeriksaan ini dengan *board independence* tetap (moderasi). Koefisien regresi KA sebesar 0,266, ini berarti bahwa jika kepemilikan asing naik satu unit, pengungkapan CSR meningkat sebesar 0,266 unit dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, *board independence*, dan interaksi variabel independen dalam pemeriksaan ini dengan *board independence* tetap (moderasi). Koefisien regresi BI sebesar -1,515 menunjukkan bahwa jika *board independence* meningkat satu unit, maka akan mengurangi pengungkapan CSR sebesar 1,515 unit dengan asumsi kepemilikan institusional, pemerintah, asing, dan interaksi variabel independen pada pemeriksaan ini dengan *board independence* tetap (moderasi).

Koefisien regresi BI sebesar 2,04 berarti bahwa jika interaksi KI.BI meningkat satu unit, akan ada peningkatan yang sesuai dalam pengungkapan CSR sebesar 2,04 unit, dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *board independence*, dan interaksi BI dan KA.BI yang konstan. Koefisien regresi KP.BI sebesar 0,186 menunjukkan bahwa peningkatan satu unit pakan dalam interaksi KP.BI akan menghasilkan pertumbuhan sebesar 0,186 unit dalam pengungkapan CSR, dengan asumsi kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *board independence*, serta interaksi KI.BI dan interaksi KA.BI yang konstan. Di sisi lain, koefisien regresi BI, yang berada di -0,475, menandakan bahwa jika interaksi KA.BI meningkat satu unit, akan terjadi pengurangan pengungkapan CSR sebesar 0,475 unit, mengingat kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, *board independence*, bersama dengan interaksi KI.BI dan interaksi KP.BI yang konstan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut hasil pada tabel 8, nilai R Square (R²) adalah 0,389, menunjukkan bahwa 38,9% pengungkapan CSR dipengaruhi oleh faktor variabel independen seperti struktur kepemilikan dan *board independence*. Sisanya 61,1% dikaitkan dengan variabel yang belum dijelajahi dalam studi penelitian ini.

Uji Statistik F (Uji F)

Berdasarkan Tabel 8, F-score adalah 10.813 pada tingkat signifikansi 0.000 < 0.05. Ini menunjukkan dampak signifikan dari faktor penjelas pada variabel dependen. Dengan demikian, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk penelitian ini.

Uji Statistik t (Uji t)

Pada tabel 8, temuan menggambarkan bahwa kepemilikan institusional memberikan dampak negative pada pengungkapan CSR, mengakibatkan penolakan Ha dan penerimaan

Ho, dengan koefisien regresi -0.681 dan tingkat signifikansi $\alpha = 0.000 < 0.05$. Akibatnya, hipotesis 1 **ditolak**. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah, ditandai dengan koefisien regresi 0,216 dan tingkat signifikansi $\alpha = 0,641 > 0,05$, menunjukkan kurangnya pengaruh substansial pada pengungkapan CSR. Hasil ini menyebabkan penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga mengakibatkan hipotesis 2 **ditolak**.

Kepemilikan asing atas pengungkapan CSR signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,006 < 0,05$ dengan koefisien regresi 0,266, menunjukkan kepemilikan asing yang lebih tinggi berkorelasi dengan lebih banyak pengungkapan CSR. Hasil ini menyebabkan penerimaan Ha dan penolakan Ho, sehingga mengakibatkan hipotesis 3 **diterima**. *Board Independence* memoderasi dampak kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Interaksi (Kepemilikan Institusional * *Board Independence*) signifikan ($p=0.000, <0.05$), koefisien 2.040. Hasil ini menyebabkan penerimaan Ha dan penolakan Ho, sehingga mengakibatkan hipotesis 4 **diterima**.

Board Independence memoderasi dampak kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR; interaksi menunjukkan nilai signifikansi 0,881 dan koefisien regresi 0,186, yang mengarah pada penolakan Ha dan penerimaan Ho. Hal ini menunjukkan bahwa *board independence* tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan CSR, yang mengakibatkan hipotesis 5 **ditolak**. Interaksi lain meneliti bagaimana *board independence* memoderasi efek kepemilikan asing pada pengungkapan CSR, mengungkapkan nilai signifikansi 0,034 dan koefisien regresi -0,475. Akibatnya, Ha ditolak dan Ho diterima, menunjukkan bahwa *board independence* melemahkan hubungan antara kepemilikan asing dan pengungkapan CSR, sehingga disimpulkan hipotesis 6 **ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan saat kepemilikan saham perusahaan oleh institusional yang berupa lembaga, instansi, atau perusahaan tinggi, fokus mereka terletak pada laba dari perusahaan yang akan berdampak pada return yang diperoleh pemilik institusional tersebut dari investasi mereka di perusahaan. Dengan demikian semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula permintaan akan keuntungan, sehingga adanya insentif untuk mencapai urgensi biaya, seperti biaya yang dikeluarkan oleh kegiatan CSR perusahaan dan keterbukaan informasi (Zaid et al., 2020).

Studi penelitian sebelumnya oleh Zaid dkk (2020), Rivandi, (2021), Edison, (2017), Patrisia & I Nym, (2019) menunjukkan hubungan yang menguntungkan kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR. Namun, temuan studi ini bertentangan dengan studi Sari & Rani (2015) dan Adhima (2022) yang menggambarkan kaitan yang merugikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR, yang hasilnya selaras dengan penelitian yang dilakukan. Intinya, keberadaan institusi di perusahaan dengan angka yang substansial akan meningkatkan tingkat pengungkapan CSR perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR

Temuan menunjukkan bahwa kehadiran kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Partisipasi negara dalam investasi dalam perusahaan swasta di Indonesia masih agak terbatas. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhima (2022) mendukung temuan ini, yang memvalidasi adanya hubungan terbalik antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan CSR. Studi penelitian ini gagal mendukung temuan Zaid dkk (2020) dan Rizky (2015) yang melakukan penelitian

dan menentukan bahwa kepemilikan pemerintah memberikan dampak signifikan pada pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan CSR

Analisis hasil studi penelitian mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, menunjukkan kepemilikan asing yang lebih tinggi mengarah pada peningkatan pengungkapan CSR. Pemilik asing memprioritaskan pekerjaan, pemanasan global, dan masalah lingkungan. Studi oleh Zaid dkk (2020) mengkonfirmasi studi sebelumnya, menunjukkan efek positif kepemilikan asing pada pengungkapan CSR, walaupun tidak signifikan secara statistik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi *Board Independence*

Temuan penelitian ini menemukan *board independence* mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan demikian, dengan meningkatkan peran *board independence* di antara manajemen dan pemilik saham institusional, *board independence* dapat mendorong pemilik institusional untuk berinvestasi dalam perusahaan. Penelitian sebelumnya oleh Zaid dkk (2020) juga mendukung temuan ini. Dalam penelitian tersebut, mereka menemukan bahwa *board independence* memiliki kemampuan untuk mengontrol hubungan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi *Board Independence*

Hasil penelitian menunjukkan *board independence* (dewan komisaris independen) tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan pemerintah yang terbatas di Indonesia menghambat dampak kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan CSR, membuat *board independence* tidak mencukupi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhima (2022) mendukung temuan ini, yang menunjukkan bahwa independensi pemerintah melemahkan hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan CSR. Sebaliknya, Zaid dkk (2020) menunjukkan bahwa *board independence* dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR dengan moderasi *Board Independence*

Kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan adanya moderasi dari *board independence* (dewan komisaris independen). *Board Independence* tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR. Kepemilikan asing sebagian mendukung pengungkapan tanggung jawab sosial yang baik, bahkan di perusahaan kecil. Kehadiran kepemilikan asing mendorong pengungkapan CSR yang baik karena kesadaran pemilik yang ada. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhima (2022) mendukung temuan ini, yang mana menjelaskan *board independence* tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Studi ini tidak konsisten dengan temuan Zaid dkk (2020) melaporkan *board independence* memperkuat hubungan antara kepemilikan asing dan pengungkapan CSR.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Studi penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelidiki bagaimana struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di perusahaan pertambangan di BEI pada tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. (2) Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. (3) Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. (4) *Board Independence* mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. (5) *Board Independence* tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR. (6) *Board Independence* tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR.

Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah terbukti tidak dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Namun kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah kepemilikan asing dari suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR nya. Hal ini menjelaskan teori agensi bahwa kepemilikan yang tersebar pada suatu perusahaan membuat masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham juga menyebar, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan yang lebih besar pada satu jenis kepemilikan dapat menyelesaikan konflik keagenan secara lebih efektif karena memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut terlibat dalam pembahasan masalah perusahaan termasuk di dalamnya terkait pengungkapan CSR.

Selain itu, *board independence* mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Dengan kata lain, melalui penambahan peran *board independence* di antara pemilik saham institusional dengan manajemen dapat mendorong pemilik institusional dalam perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR yang baik. Teori agensi menjelaskan perusahaan dengan tingkat penyebaran kepemilikan yang rendah atau dalam hal ini kepemilikan terfokus pada institusional akan mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemilik saham. Menurut teori agensi, *board independence* mampu menetralkan konflik keagenan tersebut. *Board Independence* dapat memberikan masukan pada saat rapat sehingga diyakini *board independence* dapat memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR. Namun sebaliknya *board independence* tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing dengan pengungkapan CSR.

Keterbatasan

Studi penelitian ini memperluas pengetahuan tentang bagaimana struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan CSR. Keterbatasan studi ini meliputi: ukuran sampel kecil hanya dari perusahaan pertambangan Tbk, data hanya sampai tahun 2022, dan fokus pada faktor-faktor non-keuangan internal seperti struktur kepemilikan alih-alih variabel tata kelola perusahaan yang lebih luas yang berdampak pada pengungkapan CSR.

Saran

Keterbatasan sebelumnya dibahas, yang mengarah pada saran dari peneliti untuk studi lebih lanjut untuk meningkatkan penelitian. Saran-saran tersebut termasuk memperluas ruang lingkup perusahaan yang diteliti, memperpanjang jangka waktu penelitian hingga 2023, dan mempertimbangkan dampak faktor non-keuangan pada pengungkapan CSR bersama dengan faktor eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhima, M. F., & Indriastuti, M. (2022). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Likuiditas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1(1), 81–99. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26755/7496>
- Adiputri Singal, P., & Wijana Asmara Putra, I. N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 468. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p30>
- Agustia, D. (2013). Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 27–42. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.27-42>
- Amran, A., & Devi, S. S. (2015). The impact of government and foreign affiliate influence on corporate social reporting: The case of Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 23(4), 386–404. <https://doi.org/10.1108/02686900810864327>
- Annisa, I. N., & Nazar, M. R. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dengan Variabel Kontrol Profitabilitas, Umur, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2011-2013). *E-Proceeding of Management*, 2(1), 313–322.
- Branco, M. C., & Rodrigues, L. L. (2013). Social responsibility disclosure: A study of proxies for the public visibility of Portuguese banks. *British Accounting Review*, 40(2), 161–181. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2008.02.004>
- Consuelo, M., & Martínez, P. (2018). *Commitment of independent and institutional women directors to corporate social responsibility reporting. September 2017*, 1–15. <https://doi.org/10.1111/beer.12218>
- Dyck, A., Lins, K. V., Roth, L., & Wagner, H. F. (2019). Do institutional investors drive corporate social responsibility? International evidence. *Journal of Financial Economics*, 131(3), 693–714. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.08.013>
- Edison, A. (2017). STRUKTUR KEPEMILIKAN ASING, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Utama Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014). In *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 11, Issue 2).
- Elgergeni, S., Khan, N., & Kakabadse, N. K. (2018). Firm ownership structure impact on corporate social responsibility: evidence from austerity U.K. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 25(7), 602–618. <https://doi.org/10.1080/13504509.2018.1450306>
- Gago, R. F., & García, L. C. (2018). *Independent directors' background and CSR disclosure. June 2017*, 1–11. <https://doi.org/10.1002/csr.1515>
- Habbash, M. (2016). Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *Social Responsibility Journal*, 12(4), 740–754. <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2015-0088>
- Haniffa, R. M., & Cooke, T. E. (2013). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2005.06.001>
- Hunday, N., & Tarigan, J. (2017). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Melalui Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Intervening. *Business Accounting Review*, 5(2), 601–612.

- Jain, T., & Jamali, D. (2016). Looking Inside the Black Box: The Effect of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility. *Corporate Governance: An International Review*, 24(3), 253–273. <https://doi.org/10.1111/corg.12154>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- Khairina Sissandhy, A. (2014). Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–7. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Khairunnisa, P. H. (2021). *Dimoderasi Oleh Independensi Dewan Direksi. 05(02)*, 186–197.
- Khan, A., Muttakin, M. B., & Siddiqui, J. (2013). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Business Ethics*, 114(2), 207–223. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1336-0>
- Latifah, F. N., & Widiatmoko, J. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 13, Issue 03). www.wbcds.org
- Li, W., & Zhang, R. (2010). Corporate Social Responsibility, Ownership Structure, and Political Interference: Evidence from China. *Journal of Business Ethics*, 96(4), 631–645. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0488-z>
- Lopatta, K., Jaeschke, R., & Chen, C. (2017). Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility (CSR) Performance: International Evidence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 24(3), 199–209. <https://doi.org/10.1002/csr.1398>
- Masitoh, N. S., & Hidayah, N. (2018). PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empirik Pada Perusahaan Perbankan di BEI tahun 2014 – 2016). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 49–59. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2596>
- Muttakin, M. B., Monem, R. M., Khan, A., & Subramaniam, N. (2015). Family firms, firm performance and political connections: Evidence from Bangladesh. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(3), 215–230. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.09.001>
- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0912-z>
- Panjaitan, D. R. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. In *Jurnal Profita* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.012>
- Putri, B. A., & Achmad, K. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Keluarga, Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(1), 1–14.
- Ramadhanty, N. S., & Budiasih, I. G. A. nyoman. (2020). The Effect of Financial Leverage on Stock Returns with Corporate Social Responsibility Disclosure as Moderating Variable (Empirical Study on Mining Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2016-2018). *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(6), 48–53. www.ajhssr.com

- Randøy, T., & Goel, S. (2013). Ownership structure, founder leadership, and performance in Norwegian SMEs: Implications for financing entrepreneurial opportunities. *Journal of Business Venturing*, 18(5), 619–637. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(03\)00013-2](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(03)00013-2)
- Retnaningsih, H. (2015). Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 177–188. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/512>
- Rivandi, M. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 21–40. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6439>
- Rizky, Z., & Yuyetta, E. N. A. (2015). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Pemerintah, Daya Saing Industri, serta Profitabilitas Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Journal Undip*, 4(1), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226. <https://doi.org/10.1108/17471110910964496>
- Saptowinarko Prasetyo, M. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 61–69. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.224>
- Sari, W. N., & Rani, P. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return On Assets (Roa) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–20.
- Sofwan, M. U. (2019). Efek Moderasi Dewan Komisaris Antara Manajemen Laba Riil, Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(2), 147–168. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5017>
- Suryanto, A., & Refianto. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1–33.
- Wang, K., O, S., & Claiborne, M. C. (2013). Determinants and consequences of voluntary disclosure in an emerging market: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(1), 14–30. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2008.01.001>
- Zaid, M. A. A., Abuhijleh, S. T. F., & Pucheta-Martínez, M. C. (2020). Ownership structure, stakeholder engagement, and corporate social responsibility policies: The moderating effect of board independence. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(3), 1344–1360. <https://doi.org/10.1002/csr.1888>